



---

**KLIPING DIGITAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

**01 – 02 November 2022**

---





## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

02 / 11 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	<p>Selasa, 1 November 2022</p> <p><a href="https://realestat.id/berita-properti/manfaatkan-program-bp2bt-untuk-membeli-dan-merenovasi-rumah-begini-caranya/">https://realestat.id/berita-properti/manfaatkan-program-bp2bt-untuk-membeli-dan-merenovasi-rumah-begini-caranya/</a></p> <p>Manfaatkan Program BP2BT untuk Membeli dan Merenovasi Rumah, Begini Caranya!</p> <p>-</p> <p>Mengutip informasi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR di laman <a href="#">BP2BT Kementerian PUPR</a>, diketahui bahwa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan Rumah atau sebagian uang muka perolehan Rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana. Penyaluran dana <a href="#">BP2BT</a> diberikan pemerintah satu kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian Rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada <a href="#">MBR</a> yang memenuhi persyaratan. Untuk kelompok sasaran masyarakat yang ingin memanfaatkan untuk kepemilikan rumah tapak dan Rumah susun penghasilannya mulai dari Rp6 juta hingga maksimal Rp8,5 juta. Sedangkan masyarakat yang ingin merenovasi rumah penghasilannya mulai Rp6 juta hingga Rp6,5 juta.</p>	+
2	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b>	<p>Selasa, 1 November 2022</p> <p><a href="https://www.ayobandung.com/image/detail/5584/kementerian-pupr-targetkan-penyaluran-bantuan-subsidi-perumahan-sebanyak-274924-unit-pada-tahun-202">https://www.ayobandung.com/image/detail/5584/kementerian-pupr-targetkan-penyaluran-bantuan-subsidi-perumahan-sebanyak-274924-unit-pada-tahun-202</a></p> <p>Kementerian PUPR Targetkan Penyaluran Bantuan Subsidi Perumahan Sebanyak 274.924 Unit Pada Tahun 202</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

02 / 11 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>NARASUMBER</b>	-	
	<b>RESUME</b>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun di mana yang bersumber dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun dengan memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.	
3	<b>TANGGAL</b>	Selasa, 1 November 2022	
	<b>MEDIA</b>	<a href="https://lenteratoday.com/skema-pilot-project-rusun-skgb-surabaya-solusi-pemkot-atasi-antrian-hunian-rusun/">https://lenteratoday.com/skema-pilot-project-rusun-skgb-surabaya-solusi-pemkot-atasi-antrian-hunian-rusun/</a>	
	<b>JUDUL</b>	Skema Pilot Project Rusun SKBG Surabaya, Solusi Pemkot Atasi Antrian Hunian Rusun	
	<b>NARASUMBER</b>	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat	
	<b>RESUME</b>	Adakan rapat bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu diikuti oleh asosiasi pengembang, PT Yekape, para pakar dan pemerhati hunian di Indonesia. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat pastikan pihaknya sudah menggelar rapat penyiapan pilot project rumah susun (rusun) dengan skema SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung) Kota Surabaya. Menurutnya, dengan adanya SKBG, lahan pemerintah kota bisa digunakan untuk dibangun rusunami oleh pengembang dengan sistem sewa lahan selama 60 tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 tahun selama bangunan masih layak berdasarkan hasil pengecekan dinas teknis terkait. Kini, di Surabaya ada 22 rusunawa milik Pemkot Surabaya dan dihuni oleh 5.137 KK yang berasal dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Kami berharap MBR ini segera mentas dari MBR-nya dan dapat memiliki hunian di Rusunami, sehingga Rusunawa yang telah ada dapat tepat sasaran untuk menyediakan hunian bagi MBR. Dengan Skema ini, Pemkot Surabaya tidak kehilangan aset, namun juga dapat menyelesaikan antrian hunian rusun yang mencapai 12.970 pendaftar.	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

02 / 11 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

4	<b>TANGGAL</b>	Rabu, 02 November 2022	+
	<b>MEDIA</b>	<a href="https://www.republika.co.id/berita/rkodro380/pemkot-surabaya-siapkan-pilot-project-rusun-dengan-skema-skgb-sarusun">https://www.republika.co.id/berita/rkodro380/pemkot-surabaya-siapkan-pilot-project-rusun-dengan-skema-skgb-sarusun</a>	
	<b>JUDUL</b>	Pemkot Surabaya Siapkan Pilot Project Rusun dengan Skema SKBG Sarusun	
	<b>NARASUMBER</b>	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat	
	<b>RESUME</b>	Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan pilot project rumah susun (rusun) dengan skema sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun (SKBG Sarusun) di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat dalam rapat itu, pihaknya fokus membahas tindak lanjut kebutuhan hunian di Kota Surabaya yang saat ini mencapai 12.970 unit. Melalui acara ini, lanjut dia, diharapkan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat dapat dilaksanakan dan segera terwujud di Surabaya melalui salah satu alternatif, yaitu skema SKBG Sarusun. Dengan skema ini, Pemkot Surabaya tidak kehilangan aset, namun juga dapat menyelesaikan antrean hunian rusun yang mencapai 12.970 pendaftar.	



01 / 11 / 2022

Sumber: realestat.id

---

## **Manfaatkan Program BP2BT untuk Membeli dan Merenovasi Rumah, Begini Caranya!**

**RealEstat.id (Jakarta)** - Rumah layak huni merupakan keinginan dan impian dari setiap manusia. Rumah juga menjadi tempat tinggal saat mereka berkeluarga dan memiliki anak-anak generasi penerus.

Namun demikian, terkadang ada saja kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut. Penghasilan yang tidak menentu maupun masalah keuangan atau ekonomi serta ketidaktahuan bagaimana cara membangun rumah yang baik dan benar adalah beberapa kendala yang sering dihadapi di lapangan.

Hal itu tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan bidang perumahan termasuk masyarakat. Adanya pencanangan **Program Sejuta Rumah** (PSR) sebagai salah satu program strategis nasional oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia.

Salah satu bentuk pelayanan pemerintah di sektor perumahan untuk masyarakat dilaksanakan melalui Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (**KemenPUPR**) dengan **Bank Dunia** untuk mendorong agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak.

Mengutip informasi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR di laman **BP2BT Kementerian PUPR**, diketahui bahwa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan Rumah atau sebagian uang muka perolehan Rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Penyaluran dana **BP2BT** diberikan pemerintah satu kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian Rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada **MBR** yang memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan kelompok sasaran BP2BT berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 32 Tahun 2021 dan Keputusan menteri PUPR Nomor 18/KPTS/M/2022 antara lain masyarakat yang mempunyai penghasilan, belum pernah memiliki rumah, belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratan selanjutnya yang harus dipenuhi adalah masyarakat memiliki lahan atau rumah satu-satunya yang rusak total di atas tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan



01 / 11 / 2022

Sumber: realestat.id

---

atau perbaikan rumah swadaya, memiliki akta nikah, memiliki tabungan minimal tiga bulan dengan saldo minimal Rp2 juta – Rp6 juta tergantung penghasilan yang dimiliki serta memiliki SPT Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

Dana BP2BT juga dapat digunakan untuk pembiayaan uang muka untuk kepemilikan Rumah Tapak, Sarusun atau sebagian dana untuk Pembangunan Rumah Swadaya. Batasan penghasilan kelompok sasaran BP2BT saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) zona wilayah

Penyaluran Program BP2BT terbagi dalam tiga zona yakni Zona I (Wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jabodetabek), dan Sulawesi), Zona II (Wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Zona III (Wilayah Papua dan Papua Barat).

Untuk kelompok sasaran masyarakat yang ingin memanfaatkan untuk kepemilikan rumah tapak dan Rumah susun penghasilannya mulai dari Rp6 juta hingga maksimal Rp8,5 juta. Sedangkan masyarakat yang ingin merenovasi rumah penghasilannya mulai Rp6 juta hingga Rp6,5 juta.

Sedangkan rencana anggaran biaya pembangunan rumah swadaya untuk Zona I dan Zona II maksimal Rp120 juta sedangkan di Zona III Rp155 juta. Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan Rumah Swadaya paling banyak untuk Zona I dan Zona II Rp60 juta dan khusus Zona III Rp77,5 juta.

Besaran dana BP2BT yang diberikan kepada Penerima Manfaat ditentukan dari Penghasilan Kelompok Sasaran dan Nilai Rumah atau Rencana Anggaran biaya (RAB) dengan nilai paling besar Rp32.400.000 dan paling sedikit Rp21.400.000. Sedangkan Besaran uang muka untuk kepemilikan rumah yang diberikan BP2BT paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari nilai rumah, dimana uang muka yang disediakan oleh kelompok sasaran paling sedikit 5%.

Bantuan ini ternyata masih jarang dilirik oleh masyarakat sehingga dalam proses penyalurannya masih belum optimal. Padahal masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan bantuan tersebut karena bank-bank penyaluran dana BP2BT juga cukup banyak *lho*, ada [Bank BTN](#), Bank BTN Syariah, BNI, BTPN, BRI dan Bank Jateng.

Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Program BP2BT ini, masyarakat juga bisa datang langsung ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu juga bisa melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube di [@pupr\\_pembiayaan](#) maupun menghubungi via hotline 0811-9125-291.

Berdasarkan Surat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan berbagai kelompok sasaran Program BP2BT ini pun beraneka ragam seperti masyarakat beraneka ragam maupun mereka yang berprofesi sebagai pekerja formal dan informal. Jadi bukan berarti masyarakat



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

01 / 11 / 2022

| Sumber: realestat.id

---

yang berpenghasilan tidak tetap tidak  
dibantu oleh pemerintah.

Saatnya Program BP2BT ini dimanfaatkan  
agar lebih banyak masyarakat yang  
memiliki dan tinggal di hunian yang layak  
huni.

[https://realestat.id/berita-  
properti/manfaatkan-program-bp2bt-  
untuk-membeli-dan-merenovasi-rumah-  
begini-caranya/](https://realestat.id/berita-properti/manfaatkan-program-bp2bt-untuk-membeli-dan-merenovasi-rumah-begini-caranya/)





01 / 11 / 2022

| Sumber: ayobandung.com

---

## **Kementerian PUPR Targetkan Penyaluran Bantuan Subsidi Perumahan Sebanyak 274.924 Unit Pada Tahun 2022**

Author: Dina Miladina Dewimulyani

Suasana pembangunan perumahan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 1 November 2022. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun di mana yang bersumber dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun dengan memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan

perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.

<https://www.ayobandung.com/image/detail/5584/kementerian-pupr-targetkan-penyaluran-bantuan-subsidi-perumahan-sebanyak-274924-unit-pada-tahun-2022>



01 / 11 / 2022

| Sumber: lenteratoday.com

---

## **Skema Pilot Project Rusun SKBG Surabaya, Solusi Pemkot Atasi Antrian Hunian Rusun**

Reporter : Miranti Nadya

Editor : Endang Pergiwati

SURABAYA (Lenteratoday) – Adakan rapat bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu diikuti oleh asosiasi asosiasi pengembang, PT Yekape, para pakar dan pemerhati hunian di Indonesia.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat pastikan pihaknya sudah menggelar rapat penyiapan pilot project rumah susun (rusun) dengan skema SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung) Kota Surabaya.

“Fokus kami dalam rapat itu adalah membahas tindak lanjut kebutuhan hunian di Kota Surabaya yang saat ini mencapai 12.970 unit. Melalui acara ini diharapkan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat dapat dilaksanakan dan segera terwujud di Surabaya melalui salah satu alternatif, yaitu skema SKBG Sarusun (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun),” kata Irvan.

Para narasumber rapat menjelaskan kesempatan penggunaan lahan pemerintah untuk dijadikan Rusunami oleh pengembang melalui SKBG Sarusun. Dengan harapan dapat menarik minat investor di bidang hunian dan properti untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Menurutnya, dengan adanya SKBG, lahan pemerintah kota bisa digunakan untuk dibangun rusunami oleh pengembang dengan sistem sewa lahan selama 60 tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 tahun selama bangunan masih layak berdasarkan hasil pengecekan dinas teknis terkait.

“Nah, di Surabaya ini ada 9 lokasi tanah aset potensial yang diprioritaskan untuk dijadikan pilot project Rusun SKBG. Semua lokasi itu sudah kita siapkan,” tegasnya.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen nantinya juga tidak perlu khawatir karena SKBG Sarusun merupakan bukti kepemilikan bangunan yang sah dan dilindungi undang-undang. Sama seperti bukti kepemilikan berupa SHMSRS (Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun).

“Bahkan bisa juga dijadikan sebagai jaminan di perbankan. Bedanya, pemilik SKBG Sarusun tidak mempunyai hak atas tanah Bersama,” ujarnya.

Adapun tujuan Pilot Project Rusun SKBG Kota Surabaya adalah sebagai bentuk penyiapan housing career atau kesinambungan penyediaan hunian berkeadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat Surabaya.



01 / 11 / 2022

|

Sumber: lenteratoday.com

---

“Kewajiban kami sebagai pemerintah kota memikirkan bagaimana mereka mendapatkan hunian terjangkau. Selaras dengan harapan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR,” kata Irvan.

Apalagi, saat ini Pemkot Surabaya tidak mempunyai cukup anggaran untuk membangun rumah susun di lokasi tersebut. Skema pembiayaan yang paling memungkinkan untuk pembangunan rusunami tersebut adalah dengan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam bentuk SKBG Sarusun.

“Kini, di Surabaya ada 22 rusunawa milik Pemkot Surabaya dan dihuni oleh 5.137

KK yang berasal dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Kami berharap MBR ini segera mentas dari MBR-nya dan dapat memiliki hunian di Rusunami, sehingga Rusunawa yang telah ada dapat tepat sasaran untuk menyediakan hunian bagi MBR,” pungkasnya.

Dengan Skema ini, Pemkot Surabaya tidak kehilangan aset, namun juga dapat menyelesaikan antrian hunian rusun yang mencapai 12.970 pendaftar.

<https://lenteratoday.com/skema-pilot-project-rusun-skgb-surabaya-solusi-pemkot-atasi-antrian-hunian-rusun/>



02 / 11 / 2022

Sumber: republika.co.id

---

## Pemkot Surabaya Siapkan Pilot Project Rusun dengan Skema SKBG Sarusun

Redaktur: Hiru Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA-- Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan pilot project rumah susun (rusun) dengan skema sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun (SKBG Sarusun) di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa (1/11/2022), mengatakan, rapat penyiapan pilot project rusun dengan skema **SKBG Sarusun** digelar di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Rapat itu diikuti oleh asosiasi pengembang, PT Yekape, para pakar dan pemerhati hunian di Indonesia," kata dia.

Menurut dia, dalam rapat itu, pihaknya fokus membahas tindak lanjut kebutuhan hunian di Kota Surabaya yang saat ini mencapai 12.970 unit. Melalui acara ini, lanjut dia, diharapkan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat dapat dilaksanakan dan segera terwujud di Surabaya melalui salah satu alternatif, yaitu skema SKBG Sarusun.

Dalam rapat tersebut, kata Irvan, para narasumber menjelaskan kesempatan penggunaan lahan pemerintah untuk dijadikan Rusunami oleh pengembang melalui SKBG Sarusun. Harapannya dapat menarik minat investor di bidang hunian

dan properti untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut dia, dengan adanya SKBG, lahan pemerintah kota bisa digunakan untuk dibangun **rumah susun** sederhana milik (rusunami) oleh pengembang dengan sistem sewa lahan selama 60 tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 tahun selama bangunan masih layak berdasarkan hasil pengecekan dinas teknis terkait.

"Nah, di Surabaya ini ada sembilan lokasi tanah aset potensial yang diprioritaskan untuk dijadikan pilot project SKBG. Semua lokasi itu sudah kami siapkan," kata dia.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen nantinya juga tidak perlu khawatir karena SKBG Sarusun merupakan bukti kepemilikan bangunan yang sah dan dilindungi undang-undang. Sama seperti bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS). "Bahkan bisa juga dijadikan sebagai jaminan di perbankan. Bedanya, pemilik SKBG Sarusun tidak mempunyai hak atas tanah bersama," ujar dia.

Tujuan Pilot Project Rusun SKBG Kota Surabaya adalah sebagai bentuk penyiapan housing career atau kesinambungan penyediaan hunian berkeadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat Surabaya.

"Kewajiban kami sebagai pemerintah kota memikirkan bagaimana mereka



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

02 / 11 / 2022

Sumber: republika.co.id

---

mendapatkan hunian terjangkau. Selaras dengan harapan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR," kata Irvan.

Apalagi, lanjut dia, saat ini **Pemkot Surabaya** tidak mempunyai cukup anggaran untuk membangun rumah susun di lokasi tersebut. Skema pembiayaan yang paling memungkinkan untuk pembangunan rusunami tersebut adalah dengan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha dalam bentuk SKBG Sarusun.

Dengan skema ini, kata dia, Pemkot Surabaya tidak kehilangan aset, namun juga

dapat menyelesaikan antrean hunian rusun yang mencapai 12.970 pendaftar.

"Kini, di Surabaya ada 22 rusunawa milik Pemkot Surabaya dan dihuni oleh 5.137 KK yang berasal dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Kami berharap MBR ini segera mentas dari MBR dan dapat memiliki hunian di Rusunami, sehingga Rusunawa yang telah ada dapat tepat sasaran untuk menyediakan hunian bagi MBR," kata dia.

<https://www.republika.co.id/berita/rkodro380/pemkot-surabaya-siapkan-pilot-project-rusun-dengan-skema-skb-g-sarusun>